

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Tujuan selanjutnya untuk memaparkan hambatan yang dihadapi dalam implementasi SIPD, dampak yang dirasakan, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIPD dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumbar dinilai cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan.

Berdasarkan penelitian ini maka menghasilkan fakta-fakta yang dapat disimpulkan:

1. Implementasi aplikasi SIPD dalam proses akuntansi sudah dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Sumbar. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, terdapat 4 (empat) indikator penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi. Melalui variabel-variabel tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIPD cukup berhasil diselenggarakan di BPKAD Provinsi Sumbar. Dari keempat variabel tersebut, BPKAD Provinsi Sumatera Barat berhasil memenuhi semua variabel.
 - a. Komunikasi telah berjalan secara efektif dalam implementasi kebijakan aplikasi SIPD di BPKAD Provinsi Sumbar. Dalam implementasinya, ketiga indikator kunci dalam proses komunikasi kebijakan yaitu penyampaian, kejelasan, dan konsistensi telah dipenuhi. Penyampaian mengenai

keharusan penggunaan aplikasi SIPD untuk semua Pemerintah Daerah telah disampaikan oleh Kemendagri dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemudian, adanya komunikasi lanjutan mengenai pelaksanaannya dengan pihak Kemendagri melalui grup *Whatsapp*, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Para pelaksana di BPKAD Provinsi Sumbar sudah memahami fungsi, tujuan, dan penerapan aplikasi SIPD. Pada tahun 2023, BPKAD Provinsi Sumbar telah konsisten dalam menerapkan aplikasi SIPD untuk semua proses.

- b. Sumber daya yang tersedia di BPKAD Provinsi Sumatera Barat telah memadai dalam implementasi aplikasi SIPD, baik dalam indikator SDM, informasi, wewenang, fasilitas, dan anggaran semuanya sudah tersedia dan dapat mendukung jalannya implementasi kebijakan. Sumber daya manusia sudah cukup memadai dalam mendukung implementasi aplikasi SIPD dan sudah sesuai keahlian di bidangnya masing-masing. Informasi dan wewenang juga sudah diatur dalam Permendagri No 70 Tahun 2019 dan Permendagri No 77 Tahun 2020. Fasilitas seperti jaringan internet, komputer, meja, dan kursi sudah cukup untuk mendukung implementasi aplikasi SIPD. Akan tetapi, terdapat dua kendala yaitu server pada pusat masih sering terjadi *error system* dan memerlukan komputer versi terbaru agar pengaksesan *website* berjalan dengan lancar. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengalokasikan sekitar lebih dari lima puluh juta rupiah untuk mendukung kegiatan pelatihan aplikasi SIPD khusus modul penatausahaan.

c. Sikap pelaksana atau disposisi dari implementator kebijakan di BPKAD Provinsi Sumatera Barat ialah cukup baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat terpenuhinya satu dari dua indikator yaitu pengangkatan birokrasi. Sikap pelaksana memiliki respon yang baik dengan berupaya menjalankan tugas secara optimal, bahkan pelaksana inisiatif untuk belajar otodidak. Kemudian, para pelaksana memiliki sikap agresif yakni ketika ada permasalahan maka segera menyampaikan kepada Kemendagri. Akan tetapi, indikator insentif belum terlaksana. Insentif tidak diberikan untuk mendukung implementasi kebijakan. Namun, hal itu tidak mengurangi semangat kerja para pelaksana.

d. Struktur birokrasi yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumbar mendukung dalam implementasi aplikasi SIPD. Hal ini dapat dilihat dalam implementasinya, BPKAD Provinsi Sumbar telah memenuhi dua indikator yaitu SOP dan fragmentasi. SOP terkait pelaksanaan aplikasi SIPD diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, koordinasi yang berjalan antar OPD/SKPD maupun dengan BPKAD Provinsi Sumbar sudah berjalan dengan baik.

2. Dalam implementasi aplikasi SIPD, BPKAD Provinsi Sumatera Barat mengalami tiga hambatan. Pertama, server dan jaringan yang tidak kuat atau lemah. Kedua, belum tersedianya fitur untuk aset lain-lain. Ketiga, masih terjadinya data yang tidak terintegrasi yakni tidak tertariknya data. Dengan hambatan-hambatan tersebut, berdampak pada proses pengelolaan keuangan

yang menjadi lebih lama dan BPKAD Provinsi Sumbar telat dalam melakukan pembayaran gaji pegawai untuk semua SKPD di Provinsi Sumatera Barat.

3. Upaya yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan implementasi aplikasi SIPD ialah mengomunikasikan hambatan-hambatan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan mendiskusikan solusi yang akan diambil.

5.2 Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan dan dapat dijadikan standar dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dalam mempercepat keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang baru.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan

skripsi ini. Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu narasumber penelitian dan sampel pemerintah daerah.

1. Narasumber penelitian

Secara teoritis penelitian ini telah menggunakan narasumber yang tepat untuk menggali informasi mengenai bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini beranggapan bahwa pemilihan informan adalah orang-orang yang bisa memberikan sebuah informasi yang akurat dan bertanggung jawab secara langsung untuk menangani aplikasi SIPD di bidang akuntansi pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, ada pihak yang diwawancarai memiliki pengalaman yang singkat di bidangnya dikarenakan mereka merupakan pegawai yang baru pindah dari instansi lain.

2. Sampel Pemerintah Daerah

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Barat, sehingga peneliti belum bisa menilai bagaimana implementasi aplikasi SIPD secara keseluruhan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5.4 Saran

Sebagai pertimbangan dan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan beberapa saran bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan pemerintah pusat:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapat menggunakan narasumber yang lebih banyak dan melibatkan kepala badan sebagai narasumber penelitian dan tim implementasi SIPD Kementerian Dalam Negeri.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapat dilakukan pada seluruh OPD atau SKPD yang berada di Provinsi Sumatera Barat agar dapat melihat dan membandingkan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) antara OPD satu dengan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teori implementasi kebijakan lainnya yang terbaru dengan menggunakan variabel yang berbeda.
4. Bagi pemerintah pusat, diharapkan dapat mengembangkan sistem yang lebih matang untuk aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terutama pada server guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPD dalam proses akuntansi dan proses lainnya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

